

# **PENGADILAN AGAMA KLATEN**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2020**

Jl. K. H. Samanhudi No. 9

Klaten - Jawa Tengah 57416

Telp. 0272-321513 Fax. 0272-321513

e-mail : [admin@pa-klaten.go.id](mailto:admin@pa-klaten.go.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KLATEN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. K. H. Samanhudi No. 9**

**Telp. 0272-321513 Fax. 0272-321513**

**Klaten - Jawa Tengah 57416**

**e-mail : [admin@pa-klaten.go.id](mailto:admin@pa-klaten.go.id)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Klaten adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Klaten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Klaten. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Klaten, 16 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris



Wardoyo Dwi Astoto, S.E.  
NIP.197906302006041002

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	2
Daftar Tabel dan Lampiran .....	1
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	15
II. Neraca .....	17
III. Laporan Operasional .....	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	24
A. Penjelasan Umum .....	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Klaten .....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi .....	26
A.5. Dasar Pengukuran .....	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	39
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	39
B.2. Belanja.....	39
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	43
C.1. Aset Lancar.....	43
C.2. Aset Tetap .....	45
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	50
C.6. Ekuitas .....	51
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	51
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	51
D.2. Beban Pegawai .....	51
D.3. Beban Persediaan .....	52

D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	53
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	53
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	54
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	54
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	55
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	55
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	56
D.11.	Beban Lain-lain.....	57
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	58
D.13.	Pos Luar Biasa .....	58
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	59
E.1.	Ekuitas Awal .....	59
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	59
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset .....	59
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	59
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	60
E.3. 5	Koreksi Lain-lain .....	
F.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	62
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	62
H.	Pengungkapan Penting Lainnya	
	Laporan-laporan Pendukung.....	41
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	42

## *DAFTAR TABEL*



# Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2019 dan 2018 .....	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 2018.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018.....	39
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2019 dan 2018 .....	39
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 .....	40
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019.....	40
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 .....	40
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 .....	41
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....	42
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....	42
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018.....	43
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	44
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	44
Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 2018.....	45
Tabel 15 Rincian Aset Tetap.....	45
Tabel 16 Rincian Saldo Tanah .....	46
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	49
Tabel 18 Rincian Aset tak Berwujud .....	49
Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018 .....	50
Tabel 20 Rincian Aset tak Berwujud .....	.....
Tabel 21. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018 .....	.....
Tabel 22 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019.....	43
Tabel 23 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa .....	44
Tabel 24 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	45

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Klaten

Jl. K. H. Samanhudi No. 9 Klaten - Jawa Tengah 57416

Telp. 0272-321513 Fax. 0272-321513 e-mail : admin@pa-klaten.go.id

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Klaten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Klaten telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Klaten, 16 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



Wardoyo Dwi Astoto, S.E.  
NIP.197906302006041002

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Klaten Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 30 Juni 2020 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0,0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 3.893.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 2.078.900.252 atau mencapai 45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.174.579.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020			TA 2019	
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara	0	0	0	0	
Belanja Negara	4.174.579.000	2.078.900.252	45	1.870.240.524	

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 2019 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 14.296.830.601, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 43.360.200; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 14.252.857.901; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 612.500.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 30.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 30.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 14.266.830.601, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 14.266.830.601`.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2020	2019	Rp	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	43.360.200	3.962.500	39.397.700	994,26
Aset Tetap	14.252.857.901	14.407.196.151	(154.338.250)	(1,07)
Aset Lainnya	612.500	1.400.000	(787.500)	26,47
<b>Jumlah Aset</b>	<b>14.296.830.601</b>	<b>14.412.558.651</b>	<b>(115.728.050)</b>	<b>(0,80)</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	30.000.000	39.089.727	20.379.771	211,84
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>30.000.000</b>	<b>39.089.727</b>	<b>(9.089.727)</b>	<b>(23,25)</b>
<b>Ekuitas Dana</b>				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0
Ekuitas Dana Investasi	14.266.830.601	14.373.468.924	(106.663.323)	(0,74)
<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>14.266.830.601</b>	<b>14.373.468.924</b>	<b>(106.638.323)</b>	<b>(0,74)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>14.296.830.601</b>	<b>14.412.558.651</b>	<b>(115.728.050)</b>	<b>(080)</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2.185.584.575,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (2.185.584.575,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.46.000,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 46.000,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (2.185.538.575,-).

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 14.373.468.924,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (2.185.538.575,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.078.900.225,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp. 14.266.830.601,-

### 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA KLATEN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>	0	0	0	0
1.	<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>B.1.1</b>	0	0	0	0,-
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,-</b>
B.	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>B.2.1.</b>	3.640.379.000	1.482.445.336	41,00	1.563.753.480
2.	<b>Belanja Barang</b>	<b>B.2.2.</b>	974.490.000	571.454.916	59,00	306.487.044
3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>B.2.3.</b>	25.000.000	25.000.000	100	0
<b>Jumlah Belanja Negara</b>			<b>4.639.869.000</b>	<b>2.078.900.252</b>	<b>45,00</b>	<b>1.870.240.524</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA KLATEN**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Desember 2019
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	30.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	13.360.200	3.962.500
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>43.360.200</b>	<b>3.962.500</b>
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	9.674.387.000	9.674.387.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.917.487.435	1.892.486.435
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	4.523.318.000	4.523.318.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	4.920.400	4.920.400
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.867.857.901)	(1.687.915.684)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>14.252.857.901</b>	<b>14.407.196.151</b>
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	4.900.000	4.900.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	349.858.000	349.858.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(354.145.500)	(353.358.000)
<b>Jumlah Aset</b>		<b>14.296.830.601</b>	<b>14.412.558.651</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada pihak ketiga	C.5. 1.	0	39.089.727
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	30.000.000	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>30.000.000</b>	<b>39.089.727</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>30.000.000</b>	<b>39.089.727</b>

## EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

C.6

<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>14.266.830.601</b>	<b>14.373.468.924</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>14.296.830.601</b>	<b>14.412.558.651</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA KLATEN**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan		0	0
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	1.452.933.336	1.563.753.480
Beban Persediaan	D. 3	3.354.800	5.766.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	384.931.645	187.797.048
Beban Pemeliharaan	D. 5	140.598.935	80.335.500
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	23.640.109	27.834.267
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	180.125.750	157.793.503
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>2.185.584.575</b>	<b>2.023.279.798</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(2.185.584.575)</b>	<b>(2.023.279.798)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		46.000	0
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(2.185.538.575)</b>	<b>(2.023.279.798)</b>

Pos Luar Biasa

D. 13

**Beban Luar Biasa****0****0****Surplus (Defisit) Laporan Operasional****(2.185.538.575)****(2.023.279.798)**

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA KLATEN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2020 DAN 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Ekuitas Awal	E. 1	14.373.468.924	13.632.688.506
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.185.538.575)	(2.023.279.798)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
<b>Penyesuaian Nilai Aset</b>	E. 3	0	0
<b>Koreksi Nilai Persediaan</b>	E. 4	0	0
<b>Selisih Revaluasi Aset Tetap</b>	E. 5	0	0
<b>Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi</b>	E. 6	0	0
<b>Koreksi Lain-lain</b>	E. 7	0	0
<b>Jumlah Lain-lain</b>		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.078.900.252	1.870.240.524
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(106.638.323)	(153.039.274)
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>14.266.830.601</b>	<b>13.479.649.232</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Klaten

Visi Pengadilan Agama Klaten adalah Visi Pengadilan Agama Klaten adalah :

Terwujudnya peradilan yang mandiri dan berwibawa, menuju terwujudnya peradilan yang adil dan bermartabat ;

Misi Pengadilan Agama Klaten adalah:

1. Menciptakan pelayanan keadilan yang cepat, jujur, bersih dan berwibawa yang mandiri dan independen ;
2. Menciptakan akses layanan hukum ;
3. Menciptakan kualitas input eksternal pada proses peradilan ;
4. Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas ;

5. Menciptakan aparat peradilan yang bermartabat, berintegritas, dapat dipercaya dan transparan ;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Klaten melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian Perkara ;
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim ;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan peradilan ;
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan ;
7. Peningkatan sumber daya manusia ;
8. Peningkatan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tupoksi ;

### **A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### **A.4. Basis Akuntansi**

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Klaten adalah sebagai berikut:

##### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(2.) Pendapatan LO**

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## **(3.) Belanja**

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(4.) Beban**

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **(5.) Aset**

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### **a. Aset Lancar**

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur



dengan andal ;

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- c. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- d. Penyusunan Aset Tetap

- 
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
  - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
    - a. Tanah
    - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
    - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**e. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

**f. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

## **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp. 0,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Klaten adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	3.093.420	(3.093.420)	0
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8	0	0
<b>Total Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>3.093.420</b>	<b>(3.093.420)</b>	<b>0,00</b>

### B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara : Rp  
2.078.900.252,-

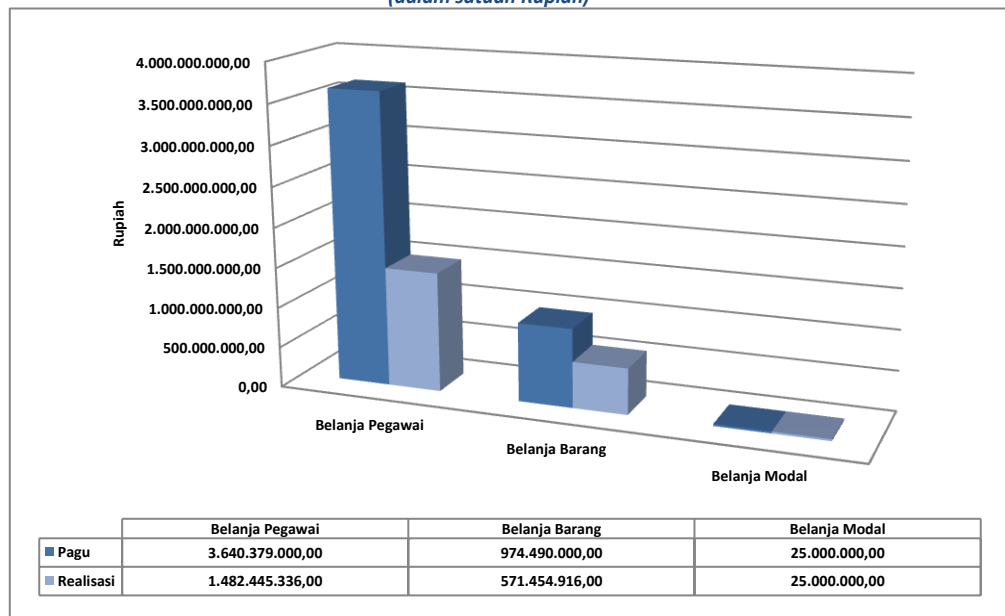
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Klaten per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp. 2.078.900.252,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 45,00% dari anggaran senilai Rp. 4.639.869.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.640.379.000	1.482.445.336	41,00
Belanja Barang	974.490.000	571.454.916	59,00
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>4.639.869.000</b>	<b>2.078.900.252</b>	<b>45,00</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.639.869.000</b>	<b>2.078.900.252</b>	<b>45,00</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2020 & 2019

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.482.445.336	1.563.753.480	(81.308.144)	5,48
Belanja Barang	571.454.916	306.487.044	264.967.872	46,36
Belanja Modal	25.000.000	0	25.000.000	100
<b>Total Belanja</b>	<b>2.078.900.252</b>	<b>1.870.240.524</b>	<b>208.659.728</b>	<b>10,03</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi  
Belanja  
Pegawai : Rp  
1.544.060.480*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Klaten per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. **1.482.445.336** dan Rp. **1.563.753.480**

Terjadi penurunan sebesar Rp. 81.308.144. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya Promosi/Mutasi 2 Hakim yang belum ada penggantinya ;

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	701.901.460	674.884.380	27.017.080	3,84
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.436	10.336	900	(9,50)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48.054.720	54.825.528	(6.670.808)	(13,88)
Beban Tunj. Anak PNS	12.998.342	15.413.534	(2.415.192)	(18,58)
Beban Tunj. Struktural PNS	17.660.000	14.420.000	3.240.000	18,35
Beban Tunj. Fungsional PNS	484.300.000	605.975.000	(121.675.000)	(25,12)
Beban Tunj. PPh PNS	55.932.268	78.115.578	(22.183.310)	(39,66)
Beban Tunj. Beras PNS	30.199.140	30.561.240	(362.100)	(1,19)
Beban Uang Makan PNS	126.925.000	86.779.000	40.146.000	31,62
Beban Tunjangan Umum PNS	5.005.000	3.515.000	1.490.000	29,77
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>1.482.985.366</b>	<b>1.563.753.480</b>	<b>(80.768.114)</b>	<b>5,44</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>1.482.985.366</b>	<b>1.563.753.480</b>	<b>(80.768.114)</b>	<b>5,44</b>



### B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi  
Belanja Barang  
: Rp.  
571.454.916*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Klaten per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 571.454.916 dan Rp. 306.487.044.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	317.764.600	160.531.850	157.232.750	49.48
Belanja Barang Non Operasional	0	17.250.000	(17.250.000)	(100)
Belanja Jasa	76.744.772	40.228.427	36.516.346	47.58
Belanja Pemeliharaan	140.598.935	80.335.500	60.263.435	42.86
Belanja Perjalanan Dinas	23.640.109	25.314.267	(1.674.158)	(7.08)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>571.454.916</b>	<b>323.660.044</b>	<b>247.794.872</b>	<b>43.36</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>571.454.916</b>	<b>323.660.044</b>	<b>247.794.872</b>	<b>43.36</b>

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja Modal  
:Rp.25.000.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Klaten per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp.25.0000.000 dan Rp. 0

Realisasi belanja Modal tahun Anggaran 2020 tidak mengalami mengalami keterlambatan. Bahkan belanja modal telah terealisasi pada triwulan pertama.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	25.000.000	0	25.000.000	100
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0)	0
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
34.614.500

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 43.360.200 dan Rp. 3.962.500.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Klaten per 30 Juni 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0

Persediaan

13.360.200

3.962.500

Total Aset Lancar

43.360.200

3.962.500

### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 30.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 30.000.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1	Uang Muka KPPN	30.000.000	30.000.000
Jumlah		30.000.000	60.000.000

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja  
Dibayar di  
Muka: Rp. 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

**Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2020	30 Juni TA 2019
1	Belanja dibayar dimuka	0	0
Jumlah		0	0

### C.1.3. Persediaan

*Persediaan:  
Rp. 13.360.200*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 13.360.200 dan Rp. 3.962.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 2018**

No.	Uraian	30 Juni 2020	30 Juni 2019
1	Barang Konsumsi	13.360.200	3.962.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>13.360.200</b>	<b>3.962.500</b>

### C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap:  
Rp  
14.252.857.901*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp. 14.252.857.901 dan Rp. 14.407.196.151. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 15 Rincian Aset Tetap  
(dalam satuan Rupiah)**

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	9.674.387.000	9.674.387.000	0
2	Peralatan dan Mesin	1.917.486.435	1.892.486.435	25.000.000
3	Gedung dan Bangunan	4.523.318.000	4.523.318.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	4.920.400	4.920.400	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>16.120.111.835</b>	<b>16.095.111.835</b>	<b>25.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan		(1.867.253.934)	(1.687.915.684)	(179.338.250)
Nilai Buku Aset Tetap		14.252.857.901	14.407.196.151	(154.338.250)

### C.2.1. Tanah

Tanah: Rp.  
9.674.387.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.674.387.000 dan Rp. 9.674.387.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	2120	AP265998	Pemerintah Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Klaten	Gedung Kantor	9.674.387.000
<b>Jumlah</b>						<b>9.674.387.000</b>

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan  
Mesin : Rp 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.917.486.435 dan Rp. 1.892.486.435.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	1.892.486.435
Mutasi Tambah	25.000.000
Mutasi Kurang	0

Saldo per 30 Juni 2020	1.917.486.435
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	101.593.071
Nilai Buku 30 Juni 2020	1.815.895.364

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
4.523.318.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.523.318.000 dan Rp. 4.523.318.000..

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2019	4.523.318.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0

Saldo per 30 Juni 2020	4.523.318.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	4.523.318.000

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	0

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020

0

Nilai Buku 30 Juni 2020

0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp  
4.920.400*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.920.400 dan Rp. 4.920.400.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2019	4.920.400
------------------------	-----------

Mutasi Tambah	0
---------------	---

Mutasi Kurang	0
---------------	---

Saldo per 30 Juni 2020	4.920.400
------------------------	-----------

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
---------------------------------------	---

Nilai Buku 30 Juni 2020	4.920.400
-------------------------	-----------

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi  
dalam  
Pengerjaan : Rp  
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
1.867.253.934*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp. (1.867.253.934) dan Rp. (1.687.915.684).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	9.674.387.000	0	9.674.387.000
1	Peralatan dan Mesin	1.917.486.435	1.487.683.493	429.802.94
2	Gedung dan Bangunan	4.532.318.000	379.570.441	4.152.747.55
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	
4	Aset Tetap Lainnya	4.920.000	0	4.920.00
5	Software	4.900.000	4.287.500	612.50
6	Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	349.858.000	349.858.000	
<b>Jumlah</b>		<b>16.168.997.235</b>	<b>2.221.399.434</b>	<b>13.948.597.80</b>

#### C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud :  
Rp 4.900.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.900.000 dan Rp. 4.900.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 18 Rincian Aset tak Berwujud**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
-----	--------	-------



1	Anti Virus	4.900.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>4.900.000</b>

#### C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp 349.858.000*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. . **349.858.000**. dan Rp. **349.858.000**. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Klaten serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 30 Juni 2019	349.858.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	349.858.000

#### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp30.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 39.089.727. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 9.620.229,- .Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Klaten per 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2020 dan 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Uang Muka dari KPPN	30.000.000	30.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>

##### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 30.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 30.000.000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang

masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

Cadangan  
Piutang:  
Rp  
14.266.830.601

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.266.830.601 dan Rp. 14.373.468.924. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2020 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 20.910.273 (69.70%) dari nilai per 31 Desember TA 2019. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 30.000.000, sedangkan per 31 Desember TA 2019 tercatat sebesar Rp. 39.089.727.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan  
PNbp : Rp. 0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp. 0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2020**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
<b>Total Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai  
: Rp  
1.544.060.480

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.452.933.336 dan Rp. 1.53.753.480. Beban Pegawai adalah

beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	701.901.460	674.884.380	27.017.080	3,84
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.436	10.336	(900)	(9,5)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48.054.720	54.080.970	(6.026.250)	(12,54)
Beban Tunj. Anak PNS	12.998.342	15.413.534	(2.415.192)	(18,58)
Beban Tunj. Struktural PNS	17.660.000	14.420.000	3.240.000	18,34
Beban Tunj. Fungsional PNS	484.300.000	605.975.000	(121.675.000)	(25,12)
Beban Tunj. PPh PNS	55.932.268	78.115.578	(22.183.310)	(39,90)
Beban Tunj. Beras PNS	30.199.140	30.561.240	(362.100)	(1,19)
Beban Uang Makan PNS	126.925.000	86.779.000	40146.000	31,62
Beban Tunjangan Umum PNS	5.005.000	3.515.000	1.490.000	29,77
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>1.482.985.366</b>	<b>1.563.755.036</b>	<b>(80.769.670)</b>	<b>(5,44)</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp. 3.354.800*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.354.800. dan Rp. 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	3.354.800	0	3.354.800	100
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0

## PENGADILAN AGAMA KLATEN TAHUN 2020

Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>3.354.800</b>	<b>0</b>	<b>3.354.800</b>	<b>100</b>

## D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp  
207.490.048*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 45.054.045 dan Rp. 40.228.425. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	<b>44.487.045</b>	<b>40.065.427</b>	<b>4.421.618</b>	<b>9,93</b>
Beban Jasa Pos dan Giro	<b>567.000</b>	<b>163.000</b>	<b>404.000</b>	<b>71,25</b>
Beban Jasa Konsultan	0	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>45.054.045</b>	<b>40.228.425</b>	<b>4.825.620</b>	<b>10,71</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan:  
Rp. 80.335.500*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.140.598.935 dan Rp. 238.184.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	<b>93.589.700</b>	<b>122.434.000</b>	<b>(28.844.300)</b>	<b>(30,81)</b>

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.009.235	115.750.000	(68.740.765)	(146,22)
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>140.598.935</b>	<b>238.184.000</b>	<b>(97.585.065)</b>	<b>(69,40)</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas : Rp. 23.640.109*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.23.640.109 dan Rp. 27.834.267. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	23.040.109	27.534.267	(4.494.158)	(19,50)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	600.000	300.000	300.000	50
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota		0	0	0
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>23.640.109</b>	<b>27.834.267</b>	<b>(4.194.158)</b>	<b>(17,74)</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 180.125.750

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. **180.125.750** dan Rp. **158.406.003**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	101.593.071	95.455.230	6.137.841	6.04
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	77.745.179	61.550.773	16.194.406	20.83
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	179.338.250	157.006.003	22.332.247	12.45
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	612.500	612.500	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	175.000	175.000	0	0
Jumlah Amortisasi	787.500	787.500	0	0
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>180.125.750</b>	<b>157.793.503</b>	<b>22.332.241</b>	<b>12.39</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp. 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp. 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar  
Biasa : Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.366.545 dan Rp. 7.707.909.

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 56.931.735 dan Rp. 53.535.852. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 8.620.411.254. Revaluasi Aset tersebut berasal Aset Tanah.

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. (58.520.000) dan Rp. (53.895.000).

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang

berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	(58.520.000)
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>(58.520.000)</b>

#### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. (58.520.000)

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar 0. dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	

2 ABC

Barang

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2020 disajikan pada lampiran

### E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 14.266.830.601 dan Rp. 13.479.649.232

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca.

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK, karena selama semester I tahun 2019 ini belum ada pemeriksaan BPK

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

#### F.2.3. Rekening Pemerintah

NO	No rekening /Atas Nama	Penggunaan	Keterangan
1.	BRI Cabang Klaten 0035-01-000044-30-0, BPg 148 PENGADILAN AGAMA KLATEN	Penampung DIPA BUA	Aktif
2.	BRI Cabang Klaten 0035-01-000985-30-2, BPg 148 PENGADILAN AGAMA KLATEN	Penampung DIPA BADILAG	Aktif
3.	BRI Cabang Klaten 0035-01-002399-30-3, RPL148 PA KLATEN untuk PDT	Penampung Biaya Perkara	Aktif

#### F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi I : tanggal 27 Februari 2020, Revisi POK

### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

---

Tidak ada Ralat SPM, SSBP maupun SSPB.

### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

---

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 65/PA/SK/XII/2019 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Klaten Nomor W11-A24/3300/KU.01/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Permintaan Membayar (PPSPM), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan Staf Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2020 telah menunjuk :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Wardoyo Dwi Astoto,S.E.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Wardoyo Dwi Astoto,S.E.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Sri Supini
Bendahara	: Desi Retno Utari,A.Md



# LAPORAN PENDUKUNG

---



*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Agama Klaten**  
**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2018	2019	Per 30 Juni 2019	Per 30 Juni 2019
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>1.687.693.245</b>	<b>1.227.043.722</b>	<b>131.787.439</b>	<b>1.458.962.228</b>	<b>333.702.017</b>
1							
2	Alat Kantor	97	226.161.700	141.587.977	26.942.141	182.251.890	43.909.810
3	Alat Rumah Tangga	319	525.656.614	338.766.334	33.909.860	413.923.024	147.554.590
4	Alat Studio	1	169.000	169.000	0	169.000	0
5	Alat Komunikasi	1	9.999.000	9.999.000	0	9.999.000	0
6	Komputer Unit	17	122.674.575	221.493.357	87.174.785	9.099.929	26.399.861
7	Peralatan Komputer	11	28.071.775	15.123.237	3.226.595	18.349.832	9.721.943
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>3.797.192.071</b>	<b>320.561.925</b>	<b>107.030.400</b>	<b>61.550.773</b>	<b>3.526.073.227</b>
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	3.797.192.071	320.561.925	107.030.400	61.550.773	3.526.073.227

**Pengadilan Agama Klaten**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
1	Barang Hibah langsung	0	0	0	0	0	NIHIL
Ni	Jumlah :						NIHIL

***Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.***

***Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)***



005  
01  
0300  
401121

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KLATEN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2020

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}